



BAB II

TEORI UMUM RELASI ISLAM DAN NEGARA

A. Pengertian Islam dan Negara

Untuk mencari akar pengertian Islam, mungkin lebih baiknya jika mencari akar pengertian agama (Din) itu sendiri. Kata din berasal dari bahasa Arab *dana*. Kata din menurut Ibnu Manzhur berarti “balasan dan pahala, taat, adat, keadaan, ketundukkan, kekuasaan, wara’, dan paksaan. Sedangkan menurut Ahmad ‘Athiyah Allah, kata din mempunyai arti umum dan arti khusus. Secara umum din berarti taat, adat, qadha’ hisab dan jaza; selain dari itu, din juga berarti ‘aqidah, syari’ah dan millah. Sementara itu dalam arti khusus din berarti Islam. Menurut Ahmad Faris Ibn Zakaria, kata din yang tersusun dari huruf dal, ya, dan nun, mengandung arti ketundukkan, kerendahan, dan juga berarti taat, dan hisab.³⁸

Menurut Darraz, berdasarkan versi kaum muslimin, “Din adalah peraturan Ilahi yang mengantarkan orang-orang yang berakal sehat, atas kehendak mereka sendiri, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.”³⁹ Meskipun demikian pengertian tersebut dapat disederhanakan menjadi, “Din adalah

³⁸ Aflatun Muchtar, *Tunduk Kepada Allah Fungsi Dan Peran Agama Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta : Khazanah Baru, 2001), 17.

³⁹ *Ibid.*, 19.



peraturan Ilahi yang menuntun ke arah keyakinan yang benar dan tingkah laku pergaulan hidup yang baik.”

Pengertian agama dalam masyarakat Indonesia selain dari kata agama, dikenal pula kata *din* dari bahasa Arab dan kata *religi* dari bahasa Eropa. Agama berasal dari kata Sanskrit. Satu pendapat mengatakan bahwa kata itu tersusun dari dua kata, *a* = tidak dan *gam* = pergi, jadi tidak pergi. Selanjutnya, *Din* dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan.⁴⁰

Adapun kata *Religi* berasal dari bahasa Latin. Menurut satu pendapat asalnya ialah *relegere* yang mengandung arti mengumpulkan, membaca. Agama memang merupakan kumpulan cara-cara mengabdikan kepada Tuhan. Ini terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Tetapi menurut pendapat lain, kata itu berasal dari kata *religare* yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama memang mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Dalam agama selanjutnya terdapat pula ikatan antara roh manusia dengan Tuhan, dan agama lebih lanjut lagi memang mengikat manusia dengan Tuhan.⁴¹ Menurut Cicero, *relegere* berarti melakukan suatu perbuatan dengan penuh penderitaan, yakni jenis laku peribadatan yang

⁴⁰ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta : UI-Press, 1985), 9.

⁴¹ *Ibid.*, 10.



dikerjakan berulang-ulang dan tetap. Lactancius mengartikan kata *relegere* sebagai mengikat menjadi satu dalam suatu persatuan bersama.⁴²

Sedangkan pengertian agama dari segi istilah dapat dikemukakan sebagai berikut. Elizabet K. Nottingham dalam bukunya *Agama dan Masyarakat* berpendapat bahwa agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta.⁴³

Pengertian agama yang dibangun kaum sosiolog tersebut bertolak dari *das sein*, yakni agama yang dipraktikkan dalam kenyataan empirik yang terlihat, dan bukan berangkat dari aspek *das sollen*, yakni agama yang seharusnya dipraktikkan dan secara normatif teologis sudah pasti baik adanya. Agama dalam kenyataan empirik ini bisa jadi berbeda dengan agama yang terdapat pada aspek batinnya yang bersifat substantif.⁴⁴

Islam adalah ajaran pembebasan manusia dari segala belenggu yang mengungkung dirinya hingga menjadi manusia merdeka. Islam adalah '*tahrir al-nas min 'ibadati al-'ibad ila ibadati allah*': membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia dengan hanya menyembah Allah saja.⁴⁵

⁴² Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997), 7.

⁴³ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006), 10.

⁴⁴ *Ibid.*, 11.

⁴⁵ Abdul Raup Silahudin, *Membela Islam*, (Bandung : MQ Publishing, 2006), 64.



Islam itu sendiri secara etimologis berarti damai atau selamat. Artinya agama itu membawa kedamaian dan keselamatan bagi dunia, baik yang memeluknya maupun yang tidak memeluknya. Pengertian itu bermula dari kata dasar *salama* (bahasa Arab), yang berarti selamat dan damai. Kata Islam bisa juga ditarik dari kata dasar *sulama*, yang berarti tangga. Jadi, agama Islam adalah agama yang mengajak umatnya untuk menaiki tangga kesejahteraan, baik dunia maupun di akhirat. Islam juga bisa ditarik dari kata dasar *aslama*, yang berarti menyerahkan diri.⁴⁶ Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Allah di dalam Q.S. al-Imran 3:19, Sesungguhnya agama (yang benar) di sisi Allah adalah agama Islam.

Sedang pengertian Islam secara istilah atau secara khusus bahwa Islam merupakan agama yang diterima Nabi Muhammad Saw., lewat wahyu yang pertama kalinya diterima di Gua Hira,⁴⁷ yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad Saw., sebagai rasul.⁴⁸ Islam pada hakekatnya membawa ajaran-ajaran yang bersumber dari al-Qur'an dan al-hadis.

Di kalangan masyarakat Barat, Islam sering diidentikkan dengan istilah *Muhammadanism* dan *Muhammedan*. Peristilahan ini karena dinisbahkan pada umumnya agama di luar Islam yang namanya disandarkan pada nama pendirinya.

⁴⁶ Abu Su'ud, *Islamologi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), 137.

⁴⁷ *Ibid.*, 139.

⁴⁸ Harun Nasution, *Islam Ditinjau*, 24.



Di Persia misalnya ada agama zoroaster. Agama ini disandarkan pada pendirinya zarathustra (w.583 SM.). Selanjutnya terdapat nama agama Budha yang dinisbahkan kepada tokoh pendirinya Sidharta Gautama Budha (lahir 560 SM.). Demikian pula nama agama Yahudi yang disandarkan kepada orang-orang Yahudi (Jews), asal nama dari negara Juda (*Judea*) atau Yahuda.⁴⁹

Dan masyarakat Islam membentuk suatu kehidupan, atau perkumpulan, atau persukuan. Dari persukuan inilah manusia mempunyai keinginan bersama membentuk suatu wadah atau lembaga, atau negara untuk mencapai cita-cita kehidupan yang lebih sejahterah. Sebab tanpa kebersamaan manusia tidak mampu hidup sendiri.

Sebab dari itu, di dalam kitab suci al-Qur'an ada kata-kata *balad* yang disebut sampai sembilan kali, kata-kata *bilad* disebut lima kali, dan kata-kata *baldah* disebut lima kali, bahkan lebih menarik lagi, adanya suatu surat yang bernama *balad*, surat kesembilan puluh mengisahkan kota makkah. Kata-kata *balad* itu diterjemahkan dengan negeri, daerah, wilayah, yang menjadi salah satu unsur berdirinya suatu negara.⁵⁰

Gagasan tentang negara adalah setua usia manusia, karena gagasan ini telah ditemukan sejak manusia sebagai makhluk sosial. Lebih tepatnya, sejak manusia merupakan “*zoon politicon*”, makhluk berpolitik. Sebagai makhluk

⁴⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006), 64.

⁵⁰ Sjechul Hadi Poernomo, *Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan Teori dan Praktek*, (Surabaya : Cv Aulia, 2004), 1.



berpolitik dalam diri manusia, maka telah tertanam niat dan hasrat manusia untuk berorganisasi.⁵¹ Lebih dari itu, negara juga merupakan wadah atau medium untuk memajukan peradaban manusia. Dan tak dapat dipungkiri, dengan kehadiran negara dapat menciptakan tata sosial yang kondusif bagi pengembangan manusia menuju peradaban manusia.⁵²

Pengertian negara secara literal istilah merupakan terjemahan dari kata asing, yakni *state* (bahasa Inggris), *staat* (bahasa Belanda dan Jerman) dan *etat* (bahasa Prancis). Kata *staat*, *state*, *etat* itu diambil dari kata bahasa Latin *status* atau *statum*, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Kata *status* atau *statum* lazim diartikan sebagai *standing* atau *station* (kedudukan).⁵³

Pengertian negara secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat,⁵⁴ yang bercita-cita menegakkan hak dan keadilan bagi segenap rakyat,

⁵¹ *Ibid.*, 2.

⁵² *Ibid.*, 3.

⁵³ Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2000), 41.

⁵⁴ *Ibid.*, 42.

serta berusaha untuk memudahkan jalan mencari penghidupan dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian.⁵⁵

Sedang pengertian negara menurut para pakar :

- a. Logemann bahwa negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat. Organisasi itu sesuatu pertambahan jabatan-jabatan atau lapangan-lapangan kerja.⁵⁶
- b. Roger H. Soltau bahwa negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama, atas nama masyarakat.
- c. Max Weber bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
- d. Robert M. Maclever bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh

⁵⁵ Mushthafa As Siba 'ie, *Agama dan Negara Study Perbandingan Antara Yahudi-Kristen-Islam*, (Surabaya : Asia Afrika, 1978), 4.

⁵⁶ Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), 1.



suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.⁵⁷

- e. Georger Jellinek bahwa negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
- f. George Wilhelm Friedrich Hegel bahwa negara adalah merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.⁵⁸

B. Konsep Islam dan Negara

Islam memberikan pandangan dunia dan makna hidup bagi manusia termasuk bidang politik. Dari sudut pandangan ini maka pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama (din) dan politik (dawlah). Argumentasi ini sering dikaitkan dengan posisi Nabi Muhammad ketika berada di Madinah yang membangun sistem pemerintahan dalam sebuah negara kota (*city-state*). Di Madinah Rasulullah berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala agama.⁵⁹ Di samping itu, negara Islam merupakan negara teokrasi, negara yang diperintahkan oleh Tuhan. Negara Islam di sisi lain juga bersifat monarkis,

⁵⁷ Hendarmin Ranadireksa, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik*, (Bandung : Fokus Media, 2007), 25.

⁵⁸ Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, (Jakarta : Erlangga, 2000), 2.

⁵⁹ Dede Rosyada *et al*, *Pendidikan Kewargaan*, 61.



atau oligarkis dengan kekuasaan yang diserahkan kepada satu atau beberapa orang. Negara Islam juga merupakan *monarchi* universal, di mana adalah juga sebagai bentuk pemerintahan berdasar hukum.⁶⁰ Al-Qur'an sebagai undang-undang dasar negara Islam tidak pernah berubah dan tidak akan berubah.⁶¹

Dalam sejarah peradaban manusia, agama dan negara adalah dua institusi yang sama-sama kuat berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Tidak jarang demi negara, seseorang tidak keberatan mengorbankan jiwa dan raganya. Demikian pula, tidak jarang demi negara, seseorang tidak keberatan mengorbankan jiwa dan raganya. Konsep syahid dalam Islam dan konsep pahlawan yang berkaitan dengan negara adalah cerminan dari betapa dua institusi tersebut sama-sama mempunyai pengaruh yang demikian besar terhadap kehidupan umat manusia.⁶² Al-Qur'an menyatakan : Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan yang tidak mengerjakan kebajikan, bahwa Allah akan memberi kekhalifahan kepada mereka di muka bumi, (Q.S. al-Nuur:55).

Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kebutuhan manusia akan negara didasarkan pada akal dan hadis. Argumen rasionalnya terletak pada kebutuhan universal semua manusia untuk bergabung, bekerja sama dan menikmati

⁶⁰ Sjechul Hadi Poermono, *Islam Dalam Lintasan*, 93.

⁶¹ A. Hasjmy, *Di mana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1984), 54.

⁶² Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, (Yogyakarta : LKiS, 2007), 21.



berbagai manfaat kepemimpinan tanpa peduli apakah mereka menganut suatu agama atau tidak. Argumen rasional itu juga diperkuat dengan landasan dari Sunnah Nabi dan hadis. Ia mengajukan sejumlah Sunnah atau hadis Nabi yang menekankan perlunya kepemimpinan dan pemerintahan. Contoh sabda Nabi sebagai berikut : “Bila ada tiga orang melakukan perjalanan, maka salah seorang di antara mereka selayaknya menjadi pimpinan,” dan juga sabda Nabi yang kedua, “Enam puluh tahun berada di bawah tirani lebih baik daripada satu malam tanpa pemerintahan.”

Dari kedua hadis itu Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa praktek penguatan sebuah pemerintahan harus dianggap sebagai sarana agar manusia lebih berkesempatan mendekatkan diri kepada Allah. Memang, istilah negara (daulah) tidak disinggung di dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah, tetapi unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan dalam kitab suci al-Qur’an.⁶³ Lebih lanjut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa negara dan agama “sungguh saling berkelindan; tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya. Tanpa disiplin hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik.⁶⁴ Hal ini diperkuat oleh konsepsi Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa, syari’ah adalah untuk kebaikan manusia dan memenuhi kepentingan masyarakat. Orisinalitas wahyu berpotensi menjembatani kemauan

⁶³ Khalid Ibrahim lindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), 46.

⁶⁴ *Ibid.*, 47.



mereka untuk menerima dan taat terhadapnya, serta berfungsi sebagai perekat yang menyatukan masyarakat luas.⁶⁵

Sejalan dengan pendapat di atas, Fazlur Rahman seorang tokoh Neomodernisme Islam, juga membenarkan bahwa masyarakat Madinah yang diorganisir Nabi itu merupakan suatu negara dan pemerintahan yang membawa kepada terbentuknya suatu umat muslim.⁶⁶ Pendapat ini diperkuat oleh Ahmad Syafii Maarif, apa yang dituangkan dalam Piagam Madinah adalah penjabaran dari prinsip-prinsip kemasyarakatan yang diajarkan al-Qur'an sekalipun wahyu belum lagi rampung diturunkan.⁶⁷

Tujuan utama dari sebuah pemerintahan Islam adalah untuk membentuk sebuah masyarakat Islam. Oleh karena itu, sebuah masyarakat Islam, secara definitif adalah sebuah masyarakat yang ideal di mana tertib sosial telah dibentuk dan diatur sesuai dengan nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran, dan aturan-aturannya.⁶⁸ Sebuah pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang menerima dan mengakui otoritas absolut dari Islam. Ia berupaya untuk membentuk sebuah tertib sosial

⁶⁵ M. Umer Chapra, *Peradaban Muslim Penyebab Keruntuhan & Perlunya Reformasi*, diterjemahkan oleh Ikhwan A. Basri, (Jakarta : Amzah, 2010), 31.

⁶⁶ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Di Tinjau Dari Pandangan al-Qur'an*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1994), 2.

⁶⁷ *Ibid.*, 3.

⁶⁸ Ahmad Vaezi, *Agama Politik*, diterjemahkan oleh Ali Syahab, (Jakarta : Citra, 2006), 10.



yang Islami sesuai dengan ajaran yang terkandung di dalam Islam.⁶⁹ Di jelaskan secara baik oleh al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-din*, bahwa sesungguhnya dunia adalah ladang akhirat. Agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Negara dan agama adalah dua anak kembar. Agama adalah batang. Dan sultan adalah pemeliharanya. Sesuatu yang tak berbatang akan tumbang. Sesuatu yang tanpa pemelihara, juga akan sia-sia. Negara dan peraturannya tidak akan terselenggara, kecuali melalui kekuasaan sultan.⁷⁰

C. Partai Islam dan Negara Di Indonesia

Dari akar di atas, pada satu dasa warsa 1920-1930, menurut Taufik Abdullah merupakan “dasawarsa ideologi” dalam sejarah modern Indonesia. Di masa ini pulalah berbagai jenis ideologi, yang kemudian akan berpengaruh dalam pertumbuhan keagamaan dan dasar ideologi perjuangan.⁷¹ Gagasan Soekarno, bahwa agama dapat dan harus dipisahkan dari negara dan pemerintahan, sebab agama merupakan aturan-aturan spiritual (akhirat dan negara adalah masalah duniawi (sekular)).⁷² Sedangkan menurut Natsir sangat meyakini kebenaran Islam

⁶⁹ *Ibid.*, 11.

⁷⁰ Sjechul Hadi Poermono, *Islam Dalam Lintasan*, 7.

⁷¹ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam*, (Jakarta : Teraju, 2002), 49.

⁷² *Ibid.*, 80.



sebagai suatu ideologi kenegaraan.⁷³ Barulah pola perjuangan ini dimulai Syarikat Dagang Islam (SDI) pada tanggal 16 Oktober 1905 di Solo Jawa Tengah⁷⁴ di bawah pimpinan Samanhudi, lalu menjadi Syarikat Islam di bawah pimpinan Haji Umar Said (HOS) Cokroaminoto dan para cendekiawan muslim lainnya.⁷⁵ Ketika SI terbentuk akhirnya muncul organisasi yang lebih luas, lintas etnis, lintas pulau.⁷⁶

Kemudian partai Masyumi didirikan sebagai hasil dari kongres umat Islam tanggal 7-8 November 1945 di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan secara aklamasi disetujui menjadi satu-satunya partai politik Islam yang mewadahi semua aspirasi politik dan cita-cita umat Islam.⁷⁷ Tetapi dalam susunan anggota DPR-GR tidak tampak adanya wakil-wakil Masyumi, partai politik Islam terbesar, karena Masyumi telah dibubarkan oleh Soekarno dengan surat keputusan presiden No. 200 tahun 1960 tertanggal 17 Agustus 1960.⁷⁸

⁷³ Ibid., 112.

⁷⁴ Abdul Qadir Djaelani, *Peran Ulama dan Santri*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1994), 83.

⁷⁵ M. Mansyur Amin, *Dinamika Islam Sejarah Transformasi dan Kebangkitan*, (Yogyakarta : LKPSM, 1995), 119.

⁷⁶ Dhurorudin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), 54.

⁷⁷ Faizai Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama*, (Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 1999), 59.

⁷⁸ Abdul Qadir Djaelani, *Peran Ulama*, 121.



Pembubaran Masyumi diikuti pula dengan penangkapan tokoh-tokoh pimpinannya, termasuk ulama seperti antara lain K.H. Yunan Nasution, K. Isa Anshary, K. Muchtar Ghazali, K.H.E.Z. Muttaqim, K.H. Sholeh Iskandar.⁷⁹ Tetapi gerakan perlawanan umat Islam agak terhenti sejenak, karena pada tanggal 10 Juli 1963 Soekarno mengeluarkan keputusannya No. 139/1963 yang melarang organisasi GPII dan diikuti penangkapan para pimpinannya termasuk beberapa ulama seperti Hamka, K.H. Ghazali Sahlan, K.H. Dalari Umar. Soekarno dan PKI tambah garang dalam menghancurkan potensi umat Islam, sehingga Aidit memerintahkan Central Gerakan Mahasiswa Indonesia GGMI onderbauw PKI untuk membubarkan HMI pada bulan September 1965. Perintah Aidit ini disambut demonstrasi oleh generasi muda Islam yang dahsyat di Jakarta untuk menentang Aidit pada tanggal 19 September 1965.⁸⁰

Dua tahun setelah pemilu 1971, pemerintahan Orde baru menerapkan kebijakan baru tentang restrukturisasi politik yang berisi pengelompokan kembali semua partai politik, sebuah kebijakan yang menghasilkan pembentukan PPP, PDI dan Golkar.⁸¹ PPP yang merupakan fusi empat partai Islam, yakni NU, Partai Muslimin Indonesia, partai Syarikat Islam Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Tetapi kalangan modernis kelihatannya tidak cukup tertampung oleh

⁷⁹ *Ibid.*, 122.

⁸⁰ *Ibid.*, 123.

⁸¹ Faizai Ismail, *Ideologi Hegemoni*, 126.



partai ini. Sebab, kelompok modernis lebih suka kelompok politik yang tidak mengatasnamakan Islam.⁸² Alasan pemerintah mengenai kebijakan ini adalah untuk menjaga kestabilan negara.

Konflik antara rezim dan umat Islam Indonesia segera terlihat setelah pemilu 1977. Berdasarkan pengalaman selama pemilu ini, pemerintah kemudian meningkatkan tekanannya terhadap partai-partai politik dengan memaksa mereka untuk mengubah asas ideologinya menjadi Pancasila.⁸³

1. Relasi Islam dan Negara Nasional

Mengkaji hubungan agama dan negara di Indonesia, secara umum dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) bagian, yakni hubungan yang bersifat antagonistik dan hubungan yang bersifat akomodatif. Hubungan antagonistik merupakan sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dengan Islam sebagai sebuah agama. Sedangkan paham akomodatif lebih dipahami sebagai sifat hubungan dimana negara dan agama satu sama lain saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik.⁸⁴

⁸²Sudirman Teba, *Islam Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 2001), 13.

⁸³ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta : LKiS, 2003), 164.

⁸⁴ Dede Rosyada *et al*, *Pendidikan Kewargaan*, 64.



Selain itu teori hubungan politik dan agama di dalam Islam, antara lain, yang pertama dimaknai sebagai hubungan antara agama dan negara yang tak terpisahkan (*integrated*), seperti yang dikonsepsikan oleh para pemikir madzab Syi'ah, dan juga oleh al-Maududi, al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha.

Dalam pandangan para tokoh ini, wilayah agama dan negara tidak dapat dipisahkan; wilayah agama juga meliputi politik atau negara. Oleh karena itu, menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan (*divine sovereignty*) karena kedaulatan itu memang berasal dari dan berada di tangan Tuhan. Pandangan inilah yang juga disebut sebagai fundamentalisme Islam.⁸⁵

Kedua, pemikiran politik yang mengandung hubungan agama dan negara bersifat simbiotik, yaitu berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, negara membutuhkan agama sebagai dasar pijak kekuatan moral sehingga ia dapat menjadi mekanisme kontrol; sementara di sisi lain agama memerlukan negara sebagai sarana untuk pengembangan agama itu sendiri.⁸⁶ Ketiga, pemikiran politik yang memandang hubungan

⁸⁵ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai Konstruksi*, 24

⁸⁶ *Ibid.*, 25.



agama dan negara bersifat sekularistik. Pandangan ini menolak hubungan yang bersifat simbiotik maupun *integrated*.⁸⁷

2. Relasi Islam dan Negara Menurut Pandangan Aktivistis Islam

a. Al-Maududi (1903-1979). Menurutnya, syari'at Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau antara agama dan negara. Syariat merupakan totalitas pengaturan kehidupan manusia yang tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Negara harus didasarkan kepada empat prinsip, yaitu, mengakui kedaulatan Tuhan, menerima otoritas Nabi Muhammad, memiliki status wakil Tuhan, dan menerapkan musyawarah. Negara merupakan sarana politik untuk mengaplikasikan hukum Tuhan. dalam kaitan ini, kebangkitan jama'ah Islami merupakan representasi al-Maududi di bidang politik yang bertujuan untuk menerapkan syari'at dalam konteks kehidupan kenegaraan. Menurut al-Maududi, institusi negara Islam terdiri dari kepala negara dan lembaga legislatif. Posisi pentingnnya terletak di tangan kepala negara yang disebut imam, khalifah, atau amir. Kepala negara memiliki wewenang yang sangat besar, bahkan dapat memveto keputusan bulat yang disepakati oleh Badan

⁸⁷ *Ibid.*, 26.



- Penasehat. Kepala negara tersebut wajib ditaati selama ia sendiri mematuhi perintah Tuhan.⁸⁸
- b. Al-Mawardi (974-1058). Dalam pandangan al-Mawardi, kepemimpinan negara (*imamah*) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan dan pengaturan dunia adalah dua dimensi yang berhubungan secara simbiotik. Negara, dengan demikian, berada di bawah kontrol agama. Dalam pengangkatan kepala negara melalui sebuah pemilihan, ia membagi umat Islam menjadi dua kelompok, yakni *ahl al-Ikhtiyar* dan *ahl al-Imamah*.⁸⁹
- c. Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111 M). Menurutnya, negara dibutuhkan oleh masyarakat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan industri dan profesi. Sehingga kepala negara harus memiliki legitimasi keagamaan. Di sisi lain menurutnya, pemilihan kepala negara bukanlah keharusan rasional, melainkan keharusan agama.
- d. Ali Abd ar-Raziq berpendapat bahwa tugas Nabi Muhammad tidak lebih sekadar mengemban tugas kenabian (*innaha nubuwwah la mulk*) sebagai nabi-nabi sebelumnya. Urusan duniawi oleh Nabi Muhammad diserahkan kepada umat manusia, termasuk di dalamnya urusan politik. Lebih jauh ia menyatakan bahwa Islam tidak memiliki kaitan apapun dengan sistem

⁸⁸ *Ibid.*, 24.

⁸⁹ *Ibid.*, 25.



kekhalfahan sehingga semua kekhalfahan adalah urusan duniawi. Jadi, sesungguhnya terdapat penolakan terhadap determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara.⁹⁰

Dalam konteks ke Indonesian

- a. Idham Chalid berpendapat, diketukannya tentang konsep Syura dan demokrasi terpimpin, menurutnya ada dua hal. Pertama, ketika dia menyatakan bahwa musyawarah (syura) adalah bukti adanya demokrasi dalam Islam atau dengan kata lain syura adalah demokrasi dalam Islam. Kedua, ketika Idham menyamakan beberapa hal dalam syura dengan demokrasi terpimpin.⁹¹
- b. Adnan berpendapat, hubungan agama dan negara dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, kelompok akomodatif. Kelompok ini dipelopori oleh Nurcholis Madjid. Nurcholis Madjid berpandangan bahwa kehidupan spiritual diatur oleh agama dan kehidupan duniawi di atur oleh logika duniawi. Pemikiran ini mengandung element “sekularistik”, yaitu adanya upaya memisahkan antara agama dengan dunia, meskipun yang sebenarnya hanyalah pembedaan wilayah: ada wilayah yang semata-mata urusan agama dan ada wilayah yang semata-mata duniawi. Pemikiran seperti ini dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari “Islam politik”

⁹⁰ *Ibid.*, 26.

⁹¹ Ahmad Muhajir, *Idham Chalid Guru Politik Orang NU*, (Yogyakarta : LKiS, 2007), 120.



ke “Islam kultural.” Sebagai akibatnya, Islam lebih berwatak liberalis dan humanis yang menawarkan kebebasan dan kemanusiaan bagi penganutnya, daripada watak politis yang menakutkan, utamanya bagi penyelenggara negara. Di kalangan Nahdlatul Ulama (NU), pemikiran akomodatif dapat dilihat pada diri Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang sukses menarik gerbong NU ke khittah 1926 dan berhasil memisahkan NU dari politik praktis. Dengan demikian, tidak ada lagi politik Islam dan juga tidak ada lembaga politik Islam, atau dengan kata lain, ia mengasingkan pentingnya eksistensi lembaga politik Islam.⁹²

- c. Kedua, kelompok moderat, dengan tokoh Amien Rais, Jalaluddin Rahmat, dan Imaduddin Abdurrahim. Kelompok ini berpendirian bahwa Islam tidak hanya dipahami sebagai agama, tetapi juga sebagai ideologis. Islam ialah agama totalistik (*kaffah*) yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya kehidupan sosial politik.
- d. Ketiga, kelompok idealis-radikal. Kelompok ini beranggapan bahwa Islam berada di atas semua ideologi sehingga untuk memperjuangkannya diperlukan cara-cara kekerasan dan sekaligus menolak ideologi Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan organisasi sosial kemasyarakatan dan agama harus menjadi ideologi menggantikan

⁹² *Ibid.*, 27.



Pancasila. Pandangan ini dapat di lihat pada visi dan misi Abdul Qadir
Jaelani.⁹³

⁹³ *Ibid.*, 28.